



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Jenderal Sudirman No. 66 Km. 3,5 Telp.(0511) 4799237 - 4799105 Marabahan

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKIP Revisi)

TAHUN 2020



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Hasil pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020.

Marabahan, Pebruari 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Kuala



H. SABERI THANOOR, ST
NIP. 19680515 199603 1 004

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Barito Kuala yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didasarkan pada salah satu penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala dengan tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang penataan ruang dan bidang lingkungan hidup melalui perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan, tata ruang dan tata perkotaan, air bersih, sanitasi dan drainase, pertamanan, kebersihan serta pembinaan jasa konstruksi serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala menetapkan perencanaan strategis didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang merupakan implementasi dan perwujudan visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati yang pelaksanaannya ditetapkan ke dalam rencana kerja tahunan sehingga capaian kinerja dapat terukur dan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan.

Penyajian laporan akuntabilitas kinerja tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala ini merupakan hasil pengukuran sasaran strategis melalui program/kegiatan tahun 2020 yang diukur didasarkan parameter indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja terpilih dari beberapa keluaran (output) dan atau hasil (outcome) maupun indikator masukan (input) sehingga dapat terlihat sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelayanan yang telah diberikan dalam melaksanakan / penggunaan keuangan khususnya dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Kuala dibidang pekerjaan umum.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala nomor 21 tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013.

Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang penataan ruang dan bidang lingkungan hidup melalui perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan, tata ruang dan tata perkotaan, air bersih, sanitasi dan drainase, pertamanan, kebersihan serta pembinaan jasa konstruksi serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala mempunyai fungsi :

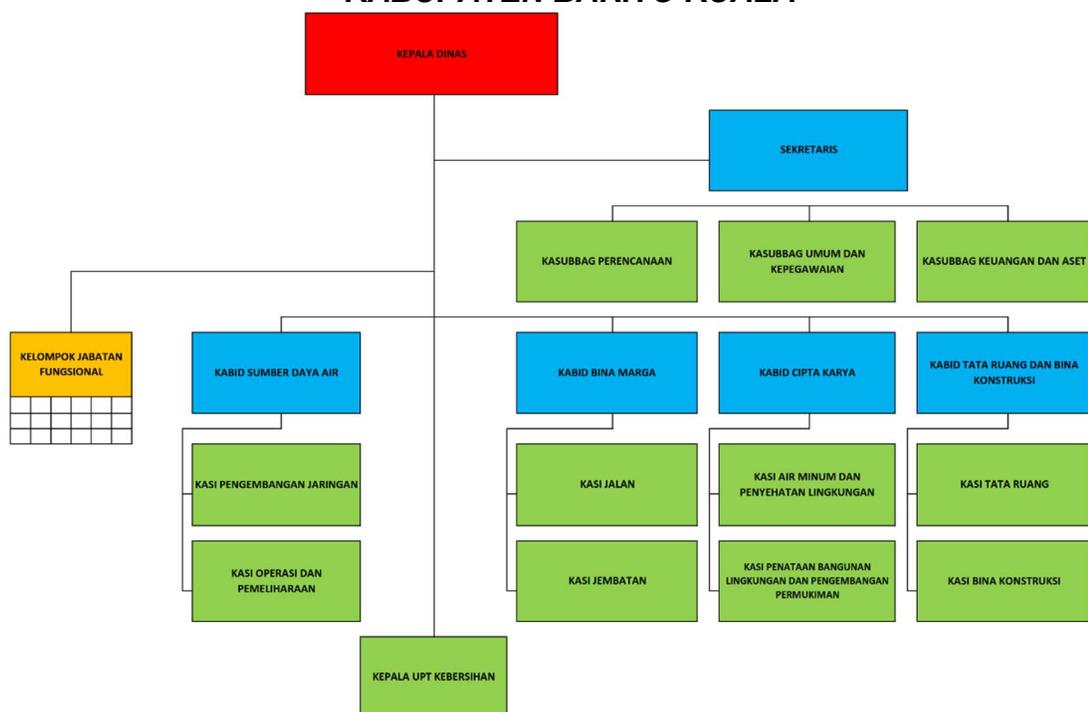
1. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan kegiatan bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan, tata ruang dan tata kota, pertamanan dan persampahan serta jasa konstruksi berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bina marga;
3. Pelaksanaan, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan sumber daya air;
4. Pelaksanaan, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan cipta karya, yang mencakup bangunan gedung, air bersih, drainase dan sanitasi;
5. Pelaksanaan, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan, yang mencakup pengembangan perumahan, pembangunan dan pengendalian perumahan serta kemitraan dan pemberdayaan perumahan;
6. Pelaksanaan, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan tata ruang dan tata perkotaan, yang mencakup pengendalian pembangunan fasilitasi di wilayah perkotaan, pembangunan dan pemeliharaan pertamanan dan pengelolaan persampahan.
7. Pelaksanaan, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi.

8. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan unit pelaksana teknis dinas.
9. Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan dan keuangan, penilaian akuntabilitas kinerja dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijabarkan lagi menjadi 5 Bidang dan 1 UPT Kebersihan. Bidang yang ada pada Dinas PUPR yaitu : Bidang Sekretariat, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi dan UPT Kebersihan.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2017 sebagai berikut:

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA**



Gambar 1.1 : Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala

1.3 Isu Strategis

Berdasarkan atas kondisi terkini dan tantangan bidang infrastruktur di Kabupaten Barito Kuala, serta mencermati visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Barito Kuala dapat ditetapkan isu-isu strategis yakni :

1. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, jaringan sawah beririgasi yang terbangun seluruhnya sudah berfungsi, namun demikian masih ada jaringan irigasi yang belum berfungsi maksimal dalam melayani lahan pertanian

2. Jaringan Jalan Kabupaten, Jalan Poros Desa dan Jalan Desa masih kurang memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah
3. Belum terpenuhinya perencanaan tata ruang yang baik sebagai acuan pembangunan
4. Belum optimalnya SDM pelaku jasa konstruksi, baik pengguna jasa ataupun penyedia jasa.
5. Belum optimalnya sarana publik dan perkantoran
6. Kurangnya akses air minum untuk masyarakat di perkotaan dan rendahnya kualitas air bersih bagi masyarakat perdesaan.
7. Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi
8. Perlunya peningkatan oprasional kebersihan
9. Kurangnya RTH publik perkotaan

1.4 Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta
3. Peraturan Bupati Kuala No. 70 tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

1.5 Sistematika

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Isu Strategis, Struktur Organisasi dan Dasar Hukum

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala No. 188.45/235/KUM 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017 -2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala, maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala adalah

2.1.1 Tujuan

Dinas PUPR memiliki tujuan Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai tata ruang. Indikator tujuan adalah Persentase ketersediaan infrastruktur pedesaan dan perkotaan.

2.1.2 Sasaran

Sasaran Dinas PUPR yaitu Meningkatnya Infrastruktur wilayah, prasarana, sarana dan utilitas. Indikator sasaran dirinci sebanyak 9 (sembilan) buah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala 2018-2022.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)
Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai tata ruang	Persentase ketersediaan infrastruktur pedesaan dan perkotaan	Meningkatnya Infrastruktur wilayah, prasarana, sarana dan utilitas	Persentase Luas lahan pertanian yang terlayani irigasi
			Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)
			Persentase rancangan produk hukum Penataan Ruang

			Persentase penyedia jasa dan pengguna yang bersertifikat
			Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar
			Persentase penduduk yang mendapat akses air minum
			Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi
			Persentase timbulan sampah yang terangkut
			Persentase luas RTH

2.2 Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja

Untuk mempermudah pencapaian sasaran, maka dibuatlah perjanjian kinerja yang menjabarkan indikator kinerja dan program kerja dilaksanakan untuk mencapai indikator tersebut

Tabel. 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2020

NO	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran
1.	Meningkatnya Infrastruktur wilayah, prasarana, sarana dan utilitas	Persentase Luas lahan pertanian yang terlayani irigasi	%	67	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	15.684.699.000
					Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	126.100.000
					Program pembangunan infrastruktur perdesaan	2.944.000.000
		Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	%	67,8	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	82.661.787.000

					Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	10.684.407.000
					Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1.010.000.000
					Program pembangunan turap/talud/bronjong	440.000.000
		Persentase rancangan produk hukum Penataan Ruang	%	20	Program Perencanaan Tata Ruang	356.678.250
					Program pengendalian pemanfaatan ruang	178.790.250
					Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1.582.762.500
					Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	7.503.663.750
		Persentase penyedia jasa dan pengguna yang bersertifikat	%	57	Program pengaturan jasa konstruksi	140.015.000
					Program pemberdayaan jasa konstruksi	348.795.000
					Program pengawasan jasa konstruksi	26.315.000
		Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	%	80	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6.529.696.350
					Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	85.371.400
					Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	179.378.650
					Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1.751.319.750
					Program pembangunan	905.628.875

					infrastruktur perdesaan	
					Program pembangunan sarana / prasarana fasilitas umum	7.164.651.630
		Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	%	67,75	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	23.085.754.370
		Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi	%	7,01	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	
		Persentase timbulan sampah yang terangkut	%	87	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3.997.091.450
					Program peningkatan sarana prasarana aparatur	1.693.808.550
					Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	126.100.000
		Persentase luas RTH	%	0,635	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1.582.762.500
					Program pembangunan infrastruktur perdesaan	5.752.344.000

Indikator yang pertama, yaitu Persentase Luas lahan pertanian yang terlayani irigasi. Persentase Luas lahan pertanian yang terlayani irigasi yaitu luas wilayah pertanian yg dialiri irigasi dlm kondisi baik dibagi dengan luas wilayah pertanian di Kab. Barito Kuala. Pada tahun 2020, target rehabilitasi irigasi adalah sepanjang 67%.

Indikator yang kedua yaitu Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap. Indikator ini merupakan perbandingan panjang jalan dalam kondisi baik dengan panjang total jalan kabupaten. Target 2020 sebesar 67,8 % jalan dalam kondisi baik. Untuk mencapai target ini dilakukan beberapa kegiatan yaitu Peningkatan Kualitas Jalan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan perbaikan kelengkapan dan bangunan pendukung jalan seperti siring dan gorong-gorong.

Indikator yang ketiga yaitu Persentase rancangan produk hukum Penataan Ruang. Indikator ini merupakan perbandingan antara dokumen RDTR yang telah dimiliki berbanding dengan dokumen yang diperlukan. Target 2020 sebesar 20 %.

Indikator yang keempat yaitu Persentase penyedia jasa dan pengguna yang bersertifikat, dicapai dengan melakukan sosialisasi, pelatihan dan sertifikasi oleh Bidang Jasa Konstruksi. Pada tahun 2020, target sebesar 80 %.

Indikator yang kelima yaitu Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar. Target pada tahun 2020, bangunan pemerintah yang sudah memenuhi syarat sebesar 57%.

Indikator yang keenam yaitu Persentase penduduk yang mendapat akses air minum. Indikator ini yaitu jumlah masyarakat pengguna air bersih, dibagi jumlah total masyarakat. Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 67,75 %.

Indikator yang ketujuh yaitu Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi. Indikator ini yaitu jumlah masyarakat yang menggunakan septick tank, dibagi jumlah total masyarakat. Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 7,01%.

Indikator yang kedelapan yaitu Persentase timbulan sampah yang terangkut. Indikator ini yaitu jumlah sampah yang terangkut ke TPA Mandastana, dibagi perkiraan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 87 %.

Indikator yang kesembilan yaitu Persentase Ruang Terbuka Hijau. Indikator ini yaitu persentase capaian luasan RTH kabupaten. Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 0,635 %.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2020, Renja Tahun 2020, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor Nomor 86 tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel .3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Infrastruktur wilayah, prasarana, sarana dan utilitas	Persentase Luas lahan pertanian yang terlayani irigasi	%	67	68,3	102
2		Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	%	67,8	63,35	93,4
3		Persentase rancangan produk hukum Penataan Ruang	%	20	23,5	117
4		Persentase penyedia jasa dan pengguna yang bersertifikat	%	57	58	102
5		Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	%	80	80	100
6		Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	%	67,75	63,32	93,5
7		Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi	%	7,01	7,10	101
8		Persentase timbulan sampah yang terangkut	%	87	82	100
9		Persentase luas RTH	%	0,635	0,665	105

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada:

a. IKU 1 : Persentase Luas lahan pertanian yang terlayani irigasi

Indikator yang pertama, yaitu Persentase Luas lahan pertanian yang terlayani irigasi. Pada tahun 2020, target rehabilitasi irigasi adalah seluas 67% yang terdiri dari 99 DIR (Daerah Irigasi Rawa) pada 5 kecamatan. Luas Daerah Irigasi Rawa di Kabupaten Barito Kuala Sesuai Permen PUPR 14/15 seluas 29.723 Ha (Data

Indeks Kinerja Sistem Irigasi – Rawa terlampir). Untuk mengukur tingkat pelayanan irigasi kabupaten Barito Kuala, dilakukan kegiatan monitoring dan pendataan kualitas jaringan irigasi. Pendataan jaringan irigasi ini dilaporkan pada Kementerian PUPR, khususnya Balai Rawa Nasional.

Untuk mendukung peningkatan dalam luas pertanian yang terlayani irigasi, dinas PUPR melaksanakan beberapa Program, yaitu:

- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan, dan
- Program Pembangunan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya



Gambar 3.1 Pemeliharaan saluran Irigasi



Gambar 3.2 Pembuatan Jalan Inspeksi

Melalui program-program ini, Dinas PUPR melakukan kegiatan rehabilitasi saluran sepanjang 334 km, melakukan pembangunan 6 buah pintu air dan merehabilitasi 2 Daerah Irigasi Rawa (DIR) kabupaten. Dinas PUPR juga melakukan rehabilitasi jalan dan jembatan inspeksi sepanjang 10 km untuk membantu pemeliharaan jaringan irigasi dan meningkatkan akses ke wilayah pertanian.

$$\% \text{ Luas lahan pertanian yang terlayani irigasi} = \frac{\text{Luas irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Luas lahan pertanian yang terlayani irigasi} = \frac{20.300 \text{ Ha}}{29.723 \text{ Ha}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Luas lahan pertanian yang terlayani irigasi} = 68,3 \%$$

Dengan adanya perbaikan sarana irigasi yang telah dilakukan tersebut, mampu melayani wilayah pertanian seluas 20.300 Ha dari total wilayah pertanian 29.723 Ha atau mencapai 68,3 %. Capaian IKU dapat dilaksanakan melebihi target kinerja yang telah ditetapkan, karena adanya dukungan dana DAK dan dana IPDMIP yang menunjang APBD kabupaten.

b. IKU 2 : Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)

Indikator yang kedua yaitu Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang). Target 2020 sebesar 67,8 % Panjang jalan dalam kondisi baik. Panjang total jalan kabupaten sebesar 628,13 km (SK Bupati Barito Kuala No. 144.45/301/KUM/2009 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Barito Kuala).

Pengukuran tingkat kondisi jalan dilakukan secara berkala dan di input dalam website Kementerian PUPR <http://sipdjd.binamarga.pu.go.id/>.



Gambar 3.3 Pengukuran kondisi jalan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL/RIGID PER-200 M

Lembar: _____ dari: 10

Nomor Proyek: 001
 Nama Proyek: KALIMANTAN SELATAN
 Daur Pelaksanaan: 04000
 No. Skema: 2020

Nomor Ruas: 001
 Nama Ruas: Marabahan - Rumpiang
 Rute/Angka: 001
 Tanggal/Waktu: 23 Juli 2020
 Surveyor: 2. Nandari

Perbaikan Perkerasan		Saluran Saluran		Kondisi Lintang		Saluran Sampung dan Saluran	
Batas-batas <input checked="" type="checkbox"/> 1. Batas Pagar <input type="checkbox"/> 2. Kasep		Saluran Saluran <input checked="" type="checkbox"/> 1. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak berfungsi <input type="checkbox"/> 3. Salang berfungsi (bertingkat luas) <input type="checkbox"/> 4. Salang berfungsi (bertingkat sempit)		Jumlah Lintang <input checked="" type="checkbox"/> 1. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. 2 / 200M <input type="checkbox"/> 3. 2 - 10 / 200M <input type="checkbox"/> 4. > 10 / 200 M		Batas Saluran Sampung dan Saluran <input checked="" type="checkbox"/> 1. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada <input type="checkbox"/> 3. Salang di Ekor jalan <input type="checkbox"/> 4. Salang di Ekor jalan	
Kendali Kelembaban <input checked="" type="checkbox"/> 1. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. Aspal bertingkat <input type="checkbox"/> 3. Lapis Aspal <input type="checkbox"/> 4. Hentol		Lantai <input checked="" type="checkbox"/> 1. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. Hentol > 1 mm <input type="checkbox"/> 3. Salang > 1 - 2 mm <input type="checkbox"/> 4. Lantai > 5 mm		Ukuran Lintang <input checked="" type="checkbox"/> 1. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. Kiri - Tengah <input type="checkbox"/> 3. Kiri - Dalam <input type="checkbox"/> 4. Batas - Tengah <input type="checkbox"/> 5. Batas - Dalam		Perbaikan Saluran <input checked="" type="checkbox"/> 1. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. Datar permukaan jalan <input type="checkbox"/> 3. Pola Aja - Permukaan jalan <input checked="" type="checkbox"/> 4. Datar permukaan jalan <input type="checkbox"/> 5. > 10 cm diukur permukaan jalan	
% Perataan <input checked="" type="checkbox"/> 1. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. < 10% luas <input type="checkbox"/> 3. 10-20% luas <input type="checkbox"/> 4. > 20% luas		% Lantai <input checked="" type="checkbox"/> 1. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. < 10% luas <input type="checkbox"/> 3. 10-20% luas <input type="checkbox"/> 4. > 20% luas		Batas Saluran <input checked="" type="checkbox"/> 1. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. < 1 cm dalam <input type="checkbox"/> 3. 1 - 3 cm dalam <input type="checkbox"/> 4. > 3 cm dalam		Kondisi Saluran Sampung dan Saluran <input checked="" type="checkbox"/> 1. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. Bersih <input type="checkbox"/> 3. Tertutup/Tersumbat <input type="checkbox"/> 4. Benci	
% Tumbuhan <input checked="" type="checkbox"/> 1. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. < 50% luas <input type="checkbox"/> 3. 50-75% luas <input type="checkbox"/> 4. > 75% luas				Korosi dan Tumpukan <input checked="" type="checkbox"/> 1. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. Ringan <input type="checkbox"/> 3. Berat		Kondisi Lintang <input checked="" type="checkbox"/> 1. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. Lintang Mulus <input type="checkbox"/> 3. Tidak ada	

Keterangan:
 - Ukuran lubang kecil (diameter < 0,5 mm), Besar (diameter > 0,5 mm), Dangkal (kedalaman < 5 mm), Dalam (kedalaman > 5 mm)
 - Status Ruas Jalan: N = Normal, P = Perbaikan, M = Melampaui, K = Kalaupun

Gambar 3.4 Input form survey jalan

DATA UMUM-KABUPATEN/KOTA -	
NO	DATA PROFIL
1	Kepuasan daerah dalam menguliskan APBD nya untuk sektor jalan (%) (Menupakan kontribusi pendanaan APBD Provinsi di luar DAK untuk sektor jalan pada provinsi)
2	Kondisi Kemantapan Jalan (Rq Tahun 2021) (Menupakan kondisi mantap jalan Tahun 2021)

KINERJA DAERAH-KABUPATEN/KOTA -	
NO	DATA PROFIL
1	Kepuasan Daerah dalam Mengikuti Proses Perencanaan DAK dengan K/L (Kepuasan Daerah dalam Mengikuti Proses Perencanaan DAK dengan K/L)
2	Kepuasan Pelaporan E-Mon DAK: Kepuasan dan ketertiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan DAK yang diukur dari pelaporan penggunaan & Monitoring DAK yang berisi progres fisik dan keuangan.
3	Kepuasan Penilaian Peta Jalan Smp yang Terverifikasi (Kepuasan Penilaian Peta Jalan Smp yang terverifikasi)
4	Kinerja jalan: Persentase peningkatan kondisi mantap dari tahun sebelumnya. Peningkatan kondisi mantap (baik dan sedang) dari tahun akhir 2020 ke tahun 2021.
5	Nilai Pemeliharaan Rutin jalan & jembatan: Kepuasan Pemerintah daerah dalam mempertahankan kondisi jalan yang diukur dengan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan

Gambar 3.5 Input data jalan pada aplikasi

Untuk mencapai target ini dilakukan beberapa program yaitu :

- Program pembangunan jalan dan jembatan
- Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Dalam program-program tersebut, Dinas PUPR melakukan beberapa kegiatan diantaranya Peningkatan/pembangunan jalan sepanjang 46,7 km, Pembangunan jembatan sebanyak 10 buah, pembangunan 17 buah gorong-gorong, pembangunan siring sepanjang 100 m, rehabilitasi jalan sepanjang 10 km dan rehabilitasi jembatan sebanyak 100 buah.

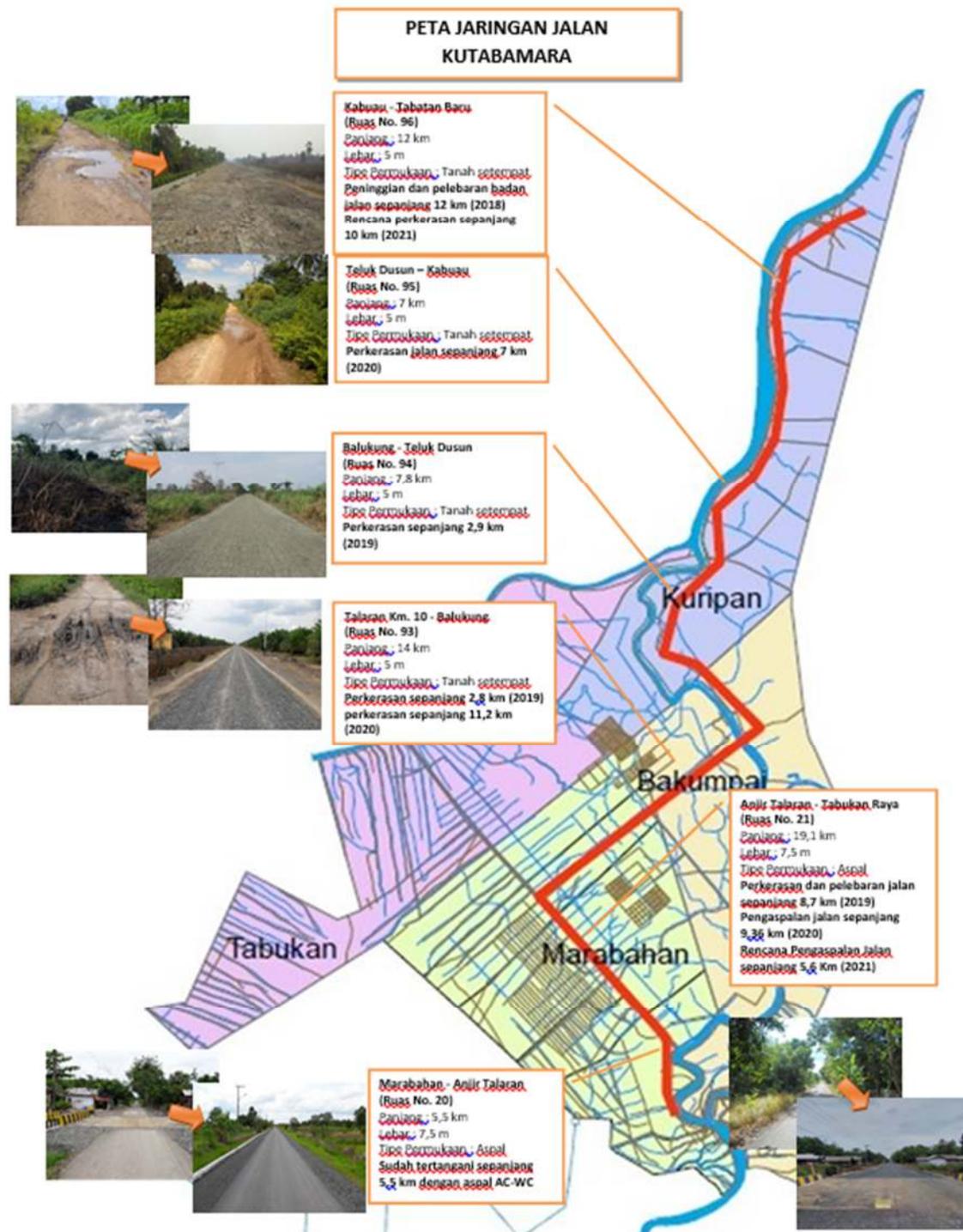
$$\% \text{ jalan kondisi mantap} = \frac{\text{panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang}}{\text{panjang total ruas jalan kabupaten}} \times 100\%$$

$$\% \text{ jalan kondisi mantap} = \frac{397,92 \text{ km}}{628,13 \text{ km}} \times 100\%$$

$$\% \text{ jalan kondisi mantap} = 63,35 \%$$

Berdasarkan hasil inventarisasi jalan pada akhir tahun 2020 (Form Database jalan terlampir), didapat Persentase panjang jalan dalam kondisi baik tahun 2020 mencapai target yang ditentukan yaitu sepanjang 63,35 % panjang jalan dalam kondisi mantap. Persentase ini berdasarkan Panjang jalan dalam kondisi baik dan dalam kondisi sedang sepanjang 397,92 km dibandingkan dengan Panjang total jalan kabupaten sepanjang 628,13 km.

Selain memperbaiki dan memelihara jalan dan jembatan kabupaten secara umum, Dinas PUPR juga berperan langsung dalam program peningkatan akses jalan KUTABAMARA (Kuripan, Tabukan, Bakumpai, Marabahan)



Gambar 3.6 Peta Jaringan Jalan Kutabamara

Peningkatan akses jalan Kutabamara adalah salah satu program unggulan yang tengah diupayakan penyelesaiannya sampai dengan akhir masa jabatan Bupati. Dengan adanya akses jalan yang baik, diharapkan dapat mempermudah arus perdagangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

c. IKU 3 : Persentase rancangan produk hukum Penataan Ruang

Indikator yang ketiga yaitu Persentase rancangan produk hukum Penataan Ruang. Indikator ini terpenuhi dengan dibuatnya RDTR perkotaan / Kawasan Strategis. Target tahun 2020 sebesar 20 %

Untuk mencapai target, dilaksanakan Program Perencanaan Tata Ruang dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Dengan Program-program ini, Dinas PUPR melakukan kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sebanyak 2 Dokumen RDTR, Survey dan pemetaan sebanyak 2 kawasan dan Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang sebanyak 2 kegiatan.

$$\% \text{ rancangan produk TR} = \frac{\text{dokumen Tata Ruang}}{\text{kebutuhan dokumen Tata Ruang}} \times 100\%$$

$$\% \text{ rancangan produk TR} = \frac{4 \text{ dokumen}}{17 \text{ dokumen}} \times 100\%$$

$$\% \text{ rancangan produk TR} = 23 \%$$

Capaian Indikator ini sudah memenuhi target sebanyak 23 %. Pada tahun 2020 sudah tercapai 4 dokumen RDTR dari total target 17 dokumen RDTR.

d. IKU 4 : Persentase penyedia jasa dan pengguna yang bersertifikat

Indikator yang keempat yaitu Jumlah penyedia jasa dan pengguna yang bersertifikat. Target sebanyak 57 % penyedia dan pengguna jasa bersertifikat.

Untuk mencapai IKU, Dinas PUPR melalui Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi melaksanakan beberapa program :

- Program pengaturan jasa konstruksi
- Program pemberdayaan jasa konstruksi
- Program pengawasan jasa konstruksi

Dengan program-program tersebut, dinas PUPR melakukan Sosialisasi/Workshop Teknik Konstruksi sebanyak 2 kali, Pendataan penyedia jasa konstruksi dan Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebanyak 75 penyedia, Diklat Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi sebanyak 4 kali dan Diklat Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi sebanyak 1 kali. Dinas PUPR juga bekerjasama dengan Balai Pelatihan Nasional untuk melaksanakan

kerjasama pelaksanaan pelatihan/workshop. Pada tahun 2020 telah tercapai sebanyak 57 % penyedia jasa yang bersertifikat. Atau sebesar 100 % target.



Gambar 3.7 Pelatihan dan Sertifikasi

e. IKU 5 : Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar

Indikator yang kelima yaitu Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar. Target pada tahun 2020 terbangun sebanyak 80% bangunan yang memenuhi syarat.

Untuk mencapai target ini dilakukan beberapa program yaitu :

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program pembangunan sarana / prasarana fasilitas umum
- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Melalui program-program tersebut, dinas PUPR melakukan kegiatan Pembangunan/ rehabilitasi rumah dinas sebanyak 3 unit, Pembangunan sarana dan prasarana umum sebanyak 17 unit, pembangunan/rehabilitasi Gedung kantor sebanyak 12 unit dan Peningkatan jalan sepanjang 2.040 meter.

Realisasi tahun 2020 telah dibangun sebanyak 80 % bangunan pemerintahan yang memenuhi syarat.

f. IKU 6 : Persentase penduduk yang mendapat akses air minum

Indikator yang keenam yaitu Persentase penduduk yang mendapat akses air minum. Pada tahun 2020 ditargetkan 67,75 % dari jumlah penduduk barito kuala mendapat pelayanan air bersih.

IKU ini selaras dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang diemban oleh Dinas PUPR yaitu meningkatkan akses air minum masyarakat

Tabel 3.4 Data dasar rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum

$$SPM \text{ cakupan pelayanan} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Masyarakat terlayani}}{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Proyeksi total masyarakat}}$$

TAHUN	AIR MINUM PERPIPAAN			AIR MINUM NON PERPIPAAN					CAKUPAN SPM PELAYANAN AIR MINUM
	Jumlah Masyarakat terlayani pada akhir tahun pencapaian SPM (Thn Berjalan)	Jumlah Penduduk Per Tahun	SPM Cakupan Pelayanan	Jumlah Masyarakat terlayani PAMSIMAS pada akhir tahun pencapaian SPM (Thn Berjalan)	Jumlah Masyarakat terlayani NON PAMSIMAS pada akhir tahun pencapaian SPM (Thn Berjalan)	Total Jumlah Penduduk Terlayani Non Perpipaan	Jumlah Penduduk Per Tahun	SPM Cakupan Pelayanan	
	(Jiwa)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(Jiwa)		(Jiwa)	(%)	
1	2	3	4=(2/3)*100	5	6		6	7=(5/6)*100	8=4+7
2014	80.723	294.109	27,45	17.206,00	34.808,00	52.014,00	294.109	17,69	45,13
2015	91.050	298.282	30,52	17.838,00	36.463,00	54.301,00	298.282	18,20	48,73
2016	104.120	302.304	34,44	17.838,00	38.188,00	56.026,00	302.304	18,53	52,98
2017	97.911	306.195	31,98	20.358,00	36.696,00	57.054,00	306.195	18,63	50,61
2018	105.518	310.016	34,04	28.188,00	54.791,00	82.979,00	310.016	26,77	60,80
2019	125.486	313.595	40,02	13.896,00	54.940,00	68.836,00	313.595	21,95	61,97
2020	130.192	317.922	40,95	16.192,00	54.940,00	71.132,00	317.922	22,37	63,32

Sumber : PDAM Kab Barito Kuala

Untuk mencapai target ini dilakukan beberapa program yaitu :

- Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
- Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Melalui program-program tersebut, dinas PUPR melakukan kegiatan Pengembangan sistem distribusi air minum sebanyak 5.500 meter unit dan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan sebanyak 3 unit.

$$\% \text{ akses air minum} = \frac{\text{jumlah penduduk yang terlayani air minum}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$$

$$\% \text{ akses air minum} = \frac{201.324 \text{ jiwa}}{317.922 \text{ jiwa}} \times 100\%$$

$$\% \text{ akses air minum} = 63,32\%$$

Dengan berbagai kegiatan tersebut, diupayakan dapat meningkatkan akses air minum. Pada tahun ini, tercapai realisasi 63,32 % penduduk sudah mendapat pelayanan air bersih



Gambar 3.8 Instalasi pengolahan air bersih

g. IKU 7 : Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi

Indikator yang ketujuh yaitu Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi. Pencapaian ini dilakukan dengan membangun MCK Komunal yang sesuai dengan syarat kesehatan, untuk melayani masyarakat dalam penanggulangan air limbah.

IKU ini juga selaras dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang diemban oleh Dinas PUPR yaitu meningkatkan pelayanan sanitasi masyarakat

Tabel 3.5 Data dasar rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) air limbah

Tahun	Jumlah penduduk yang memiliki Tangki Septik (Standar PU)	Jumlah penduduk yang terlayani MCK Komunal	Jumlah penduduk yang memiliki akses ke sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala kawasan/kota	Total jumlah penduduk yang terlayani air limbah	Jumlah penduduk Tahun	Nilai SPM tingkat pelayanan	Keterangan
	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(%)	
1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7=(5/6)*100	8
2014	-	6.750	-	6.750	294.109	2,30	
2015	-	9.500	-	9.500	298.282	3,18	
2016	-	10.800	-	10.800	302.304	3,57	
2017	1.000	13.200	-	14.200	306.195	4,64	
2018	2.250	13.800	-	16.050	310.016	5,18	
2019	3.750	15.200	-	18.950	313.595	6,04	
2020	6.475	16.100	-	22.575	317.922	7,10	

Σ Jumlah Penduduk yg terlayani tangkiseptik/MCK komunal/sistem pengolahan air limbah terpusat pada akhir thn pencapaian SPM
 Σ Jumlah total penduduk di kabupaten/Kota

$$\% \text{ akses sanitasi} = \frac{\text{jumlah penduduk yang terlayani sanitasi dengan tangki septik}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$$

$$\% \text{ akses sanitasi} = \frac{22.575 \text{ jiwa}}{317.922 \text{ jiwa}} \times 100\%$$

$$\% \text{ akses sanitasi} = 7,10\%$$

Target tahun 2020, masyarakat Kabupaten Barito kuala telah menggunakan sanitasi yang layak sebesar 7,01 %. Pada tahun 2020 tercapai 7,1 %.

h. IKU 8 : Persentase timbulan sampah yang terangkut

Indikator yang kedelapan yaitu Persentase timbulan sampah yang terangkut. Indikator ini terukur dari jumlah sampah yang diangkut ke TPA. Target pada tahun 2020 sebanyak 87 % timbulan sampah yang diangkut.



Gambar 3.9 Pengangkutan sampah ke TPA Tabing Rimbah



Gambar 3.10 Penimbunan Sampah dan Pengolahan Limbah
TPA Tabing Rimbah

Untuk mencapai target ini dilakukan dengan program :

- Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Melalui program tersebut, UPT Kebersihan melakukan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 10 unit, Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan sebanyak 10 buah, peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan sebanyak 199 orang.

Dengan melakukan kegiatan tersebut . Capaian tahun 2020 sudah sebesar 100 %.

i. IKU 9 : Persentase luasan RTH

Indikator yang kedelapan yaitu Persentase luasan RTH. Indikator ini terukur dari luasan RTH yang terbangun dibagi dengan luas wilayah perkotaan. Target pada tahun 2020 sebanyak 0,635 % luasan RTH. Untuk memenuhi target ini, bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi melakukan kegiatan Pembangunan RTH dan Pemeliharaan RTH. Capaian tahun 2020 sebesar 64,417 Ha luasan RTH perkotaan dari total 10.215 Ha atau sebesar 0,665 % luasan RTH.

$$\% \text{ luas RTH} = \frac{\text{luas RTH perkotaan yang dibangun}}{\text{luas wilayah perkotaan}} \times 100\%$$

$$\% \text{ luas RTH} = \frac{64,417 \text{ Ha}}{10.215 \text{ Ha}} \times 100\%$$

$$\% \text{ luas RTH} = 0,665\%$$



Gambar 3.10 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)



Gambar 3.10 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tabel 3.6
Capaian IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Berdasarkan Persentase
Tahun 2018

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	2
= 100	Tercapai/Sesuai target	2
>100	Melebihi target	5

Berdasarkan tabel 3.13 terlihat bahwa dari total 9 indikator, terdapat 2 indikator tidak tercapai, 2 indikator sesuai target dan 5 indikator melebihi target.

Tabel 3.7
Capaian IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Berdasarkan Kategori
Tahun 2018

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	9
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Berdasarkan tabel 3.1.4 terlihat bahwa dari total 9 indikator, terdapat 9 indikator dengan kategori sangat baik.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2020.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Nomor Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8
Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Infrastruktur wilayah, prasarana, sarana dan utilitas	9 indikator
---------------------	--	-------------

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya memiliki 1 Sasaran strategis dengan 9 (Sembilan) indikator

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	9	101,5	Melebihi target

Secara rata-rata pencapaian indikator sasaran, Dinas PUPR telah dapat mencapai sasaran 1 yang telah ditetapkan.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Sasaran 1	9	102,4					√

Secara umum, Dinas PUPR telah dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan capaian sangat baik.

Tabel 3.11
Pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Sasaran Strategis 1	9	101,5	5	56	2	22	2	22

Berdasarkan tabel 3.2.4 Dinas PUPR telah dapat melaksanakan Sasaran Strategis 1 dengan tingkat pencapaian 56 % indikator melebihi target, 22 % sesuai target dan 22 % dibawah target.

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Infrastruktur wilayah, prasarana, sarana dan utilitas

Untuk melihat capaian sasaran strategis "**Meningkatnya Infrastruktur wilayah, prasarana, sarana dan utilitas**", maka ada 9 (sembilan) indikator kinerja yang digunakan.

Capaian masing-masing sasaran dengan 9 (Sembilan) indikator tersebut pada tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun ini dengan Realisasi dan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Selisih Capaian (%)	Keterangan
			Realisasi	Realisasi		
1.	Persentase Luas lahan pertanian yang terlayani irigasi	%	65	68,3	3,3	
2.	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	%	67,5	63,35	-4,15	
3.	Persentase rancangan produk hukum Penataan Ruang	%	17,65	23,5	5,85	
4.	Persentase penyedia jasa dan pengguna yang bersertifikat	%	60	58	-2	
5.	Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	%	75	80	5	
6.	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	%	68,43	63,32	-5,11	
7.	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi	%	5,96	7,10	1,14	
8.	Persentase timbulan sampah yang terangkut	%	85	87	2	
9.	Persentase luas RTH	%	0,625	0,665	0,04	

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata indikator sasaran 1 terjadi peningkatan capaian tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2018.

Capaian indikator Sasaran Meningkatnya Infrastruktur wilayah, prasarana, sarana dan utilitas dukung oleh 24 (dua puluh empat) program.

Keberhasilan capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Infrastruktur wilayah, prasarana, sarana dan utilitas disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang baik dan pemenuhan target pada tiap kegiatan. Sehingga capaian indikator sasaran

dapat terpenuhi dengan baik. Dinas PUPR juga mendapat dana tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Saran untuk penyusunan program, agar benar-benar mendukung Indikator Sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga keberhasilan pencapaian sasaran dapat terjamin. Pada indikator yang belum tercapai target, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan agar pada akhir perencanaan renstra, target akhir dapat tercapai.

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra

No	Indikator SASARAN	Satuan				Ket.
			Relisasi 2020	Target Akhir Renstra	Capaian (%)	
1.	Persentase Luas lahan pertanian yang terlayani irigasi	%	68,3	72	94,86	
2	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	%	68,3	63,35	92,75	
3	Persentase rancangan produk hukum Penataan Ruang	%	23,5	29,41	79,90	
4	Persentase penyedia jasa dan pengguna yang bersertifikat	%	58	55	93,55	
5	Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	%	80	85	94,11	
6	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	%	63,32	79,12	80,03	
7	Persentase rumah tangga yang mendapat	%	7,10	8,49	82,65	

	elayanan sanitasi					
8	Persentase timbunan sampah yang terangkut	%	82	92	89,13	
9	Persentase luas RTH	%	0,665	0,665	103,10	

Dari tabel di atas, terlihat bahwa capaian rata-rata indikator sasaran sudah mencapai 90 % renstra. Jika setiap tahun pencapaian terus meningkat, maka target akhir tahun renstra kemungkinan dapat tercapai

Tabel 3.14

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan Capaian Provinsi dan Nasional

No	Indikator SASARAN	Satuan	Relisasi 2020	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Ket.
1.	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	%	63,32	100	100	
2.	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi	%	7,10	100	100	

Indikator sasaran dinas PUPR yang merupakan SPM yaitu Persentase penduduk yang mendapat akses air minum dan Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi. Pada tahun 2020, capaian indikator Persentase penduduk yang mendapat akses air minum sebesar 63,32 % dan capaian indikator Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi sebesar 7,10 %.

Untuk indikator pelayanan air minum, target nasional dan target provinsi adalah sebesar 100%. Untuk indikator pelayanan sanitasi, target nasional dan target provinsi juga sebesar 100%.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 221.101.804.306,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 205.133.384.618,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,78 %.

Komposisi belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 3.15

**Komposisi Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran 2020**

(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	205.267.822.752	200.857.511.854	97,85
2	Belanja Tidak Langsung	6.097.538.392	6.090.318.101	99,88
Jumlah		211.365.361.144	206.947.829.955	97,91

Sumber: RFK Dinas PUPR TA 2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa realisasi belanja langsung Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala sebesar 97,85 %, dan sisanya sebesar realisasi belanja tidak langsung sebesar 99,88 %

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 211.365.361.144 dengan realisasi sebesar Rp. 206.947.829.955 atau 97,91 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Infrastruktur wilayah, prasarana, sarana dan utilitas	211.365.361.144	206.947.829.955	97,91
	Jumlah	211.365.361.144	206.947.829.955	97,91

Sumber: RFK Dinas PUPR TA 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.17
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Infrastruktur wilayah, prasarana, sarana dan utilitas	9	101,5	206.947.829.955	97,91
	Jumlah	9	101,5	206.947.829.955	97,91

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat sasaran menunjukkan pencapaian 102,4 % yaitu sebanyak 1 (satu) sasaran. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Infrastruktur wilayah, prasarana, sarana dan utilitas	9	101,5	97,91	3,59
	Jumlah	9	101,5	97,91	3,59

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dalam tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 hasil reuiu yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 9 (indikator) sasaran tersebut, secara rata-rata telah mencapai nilai 101,5 % yang termasuk dalam Interpretasi sesuai target dan melampaui target. Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala DPA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 211.365.361.144,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 206.947.829.955,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,91%.